

Role of Information and Documentation Management Officer (PPID) In Public Information Service In Lamandau Regency

Tanthy Usiana Dundang, Tresia Kristiana, Faizal Madya

Abstract— This study aims to find out how the Role of Public Information Service Management Officials in managing information and documentation in Lamandau Regency, and the Factors that affect the Role of Management Officials Public Information Services by Information Management and Documentation Officials (PPID) in Lamandau Regency. In this study was conducted using qualitative approach with qualitative descriptive research method. While the data collection procedure used by researchers is observation techniques, documentation studies, and in-dept interviews to informants, namely the head of the Communication and Informatics Office of Lamandau Regency, the field of Public Media Management and Public Relations Lamandau, Officers PPID Lamandau and Community consisting of students and PT. Lamandau Media. The results of this study explain that the role of Information Management and Documentation Officials (PPID) in public information services has so far achieved some unfavorable results. This is evidenced by the fact that information does not spread quickly because human resources that specifically handle it are not yet available, documentation of each SOPD does not work properly due to a lack of understanding of the duties and functions of some SOPD regarding the provision and service of information, constraints in providing infrastructure especially in remote areas and budget availability.

Index Terms— Role PPID, Public Information Service

Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Lamandau

Tanthy Usiana Dundang, Tresia Kristiana, Faizal Madya

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pejabat pengelolaan informasi publik dan dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Lamandau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pejabat (PPID) di Kabupaten Lamandau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam kepada informan yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Kabupaten Lamandau, petugas PPID Kabupaten Lamandau dan Masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan PT. Lamandau Media. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi publik sejauh ini mencapai beberapa hasil yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan informasi tidak tersebar dengan cepat dikarenakan SDM yang khusus menangani belum tersedia, dokumentasi setiap SOPD tidak berjalan semestinya dikarenakan kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian SOPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi, kendala penyediaan infrastruktur khususnya di daerah-daerah terpencil dan ketersediaan anggaran.

Kata kunci— Peran PPID, Pelayanan Informasi Publik

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik di Indonesia merupakan salah satu syarat konstitusi dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada seluruh badan publik dalam kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UUKIP) tentang Keterbukaan Informasi Publik Hasil Reformasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang mengelola, menyediakan, melayani dan mendokumentasikan informasi publik, sebagai garda depan badan atau lembaga publik dalam pemberian pelayanan informasi kepada publik.

Lamandau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah pasti memiliki Badan Publik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, dari 14 Kabupaten/ Kota se - Kalimantan Tengah terdapat 3 Kabupaten yang belum aktif melakukan layanan informasi publik. Kabupaten Lamandau termasuk yang belum aktif melakukan layanan informasi publik, artinya tidak cukup memberikan layanan informasi kepada publik.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/210/V/HUK/2018. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Struktur PPID terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung PPID dan PPID Pembantu di Kabupaten Lamandau adalah terdiri dari 28 (dua puluh delapan) SOPD se-Kabupaten Lamandau; 8 (delapan) Kecamatan se - Kabupaten Lamandau yang dijabat oleh Sekretaris atau Kabag Protokol dan Komunikasi Publik.

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PPID baik internal maupun eksternal. Kendala Internal diantaranya belum optimalnya pelayanan informasi publik baik secara offline (melalui desk layanan) seperti belum memiliki fasilitas kerja yang lengkap dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani pada desk layanan tersebut. maupun online (melalui website PPID Kabupaten Lamandau) terlihat masih minimnya supply data dan informasi dalam pelayanan informasi publik PPID OPD di website PPID Kabupaten Lamandau

Sehingga dari uraian latar belakang di atas, penulis mengambil judul penelitian tentang "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Lamandau".

in Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik in Universitas Terbuka, Indonesia. E-mail: tanthydundang@gmail.com

- *Tresia Kristiana & Faizal Madya are supervisor 1 and 2 of Universitas Terbuka, Indonesia. E-mail: tresiakristiana@yahoo.co.id, faizal@ecampus.ut.ac.id*

TUJUAN PENELITIAN

Dengan mengacu pada permasalahan, tujuan penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Lamandau dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi Peran Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Lamandau.

KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

Resa Yusar Azis (2018) menyatakan Informasi Publik diperlukan bagi setiap orang, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kebutuhan sosialnya, sehingga harus adanya sumber penyedia informasi publik, salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi di sektor publik atau instansi diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa ada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12) Peran Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), yang meletakkan atasan atau pimpinan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.

Menurut Sinambela (2006:5) menyatakan bahwa pelayanan itu merupakan pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang maksimal kepada masyarakat.

Menurut Moenir (2002:12) Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji sendiri dari segi kemanusiaan. Pelayanan itu timbul karena ada faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material. dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu: kesadaran pegawai, adanya aturan, faktor organisasi, faktor kemampuan dan keterampilan, faktor sarana pelayanan.

Informasi Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,

• *Tanthy Usiana Dundang is currently pursuing master's degree program*

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Lamandau. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Kabupaten Lamandau, petugas PPID Kabupaten Lamandau dan Masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan PT. Lamandau Media. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Oleh Danang Trijayanto, Iqbal Aidar Idrus (2019) Universitas 17 Agustus 1945 tentang Peran PPID Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID agar dapat berjalan sesuai dengan regulasi, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana peran dan fungsi PPID bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP lahir pada saat good governance atau sistem pemerintah yang baik diwacanakan. sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi di Kabupaten Lamandau. Dari penelitian terdahulu ini, yang ingin peneliti gunakan pada penelitian sebelumnya untuk penelitian saat ini adalah metode yang digunakan dan melihat hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai tolak ukur hasil yang nantinya akan peneliti bahas pada penelitian.

Gambaran Umum Peran PPID dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Lamandau

Peran Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Publik dalam mengelola informasi di Kabupaten Lamandau dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik selama ini masih dalam koridor dan hasilnya yang kurang baik bagi kalangan internal dan eksternal. Kemudian di dalam kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau masih nampak belum memperlihatkan hasil yang memuaskan baik dalam hal pengisian daftar isian publikasi dikarenakan terdapat kendala yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyedia layanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam hal ini, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lamandau telah menjalankan program kerja sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan menggunakan media website sebagai sarana publikasi ke masyarakat. Sedangkan untuk program kerja peran PPID di Kabupaten Lamandau sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Lamandau yang berpedoman pada UU KIP, Perki 1/2010. Peran PPID di setiap bidang baik pelayanan informasi, dokumentasi, kearsipan dan bidang penyelesaian sengketa memiliki kendala dalam proses pelayanan publik. Keterbatasan PPID utama di Kabupaten Lamandau dalam menyediakan informasi yang lebih spesifik terkait informasi dinas lainnya membuat PPID mengalami kendala dalam pelayanan dan penyediaan informasi. Dalam upayanya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada publik dari berbagai dinas yang berada di Kabupaten Lamandau, maka pihak Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan sosialisasi dan terus memberikan dorongan kepada unit-unit PPID Pembantu / OPD untuk yang belum menyiapkan PPID nya agar secepatnya membentuk dan cepat tanggap untuk terus mensuplai berbagai informasi terbaru ke PPID utama. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi yaitu, Keterbatasan Personil / Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi di beberapa SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, termasuk wawasan dan pengetahuan dalam bidang TI, kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian SOPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi, kendala penyediaan infrastruktur khususnya di daerah-daerah terpencil dan ketersediaan anggaran.

1. Peran Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi Publik Dalam Mengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Lamandau

Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21 dan 12) Peran Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), yang meletakkan atasan atau pimpinan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Adapun salah satu indikatornya, yaitu:

a. Pelayanan informasi

Peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi masih belum terealisasi dengan baik. progres mengalami kendala keterlambatan dalam penyediaan informasi publik, hal tersebut dapat dilihat pada data rekapitulasi dari aplikasi dan pelayanan informasi publik dalam menyampaikan informasi masih kurang. Mengenai daftar isian publikasi bahwa masih banyak badan publik yang belum mengisi daftar isian tersebut sehingga terjadi keterlambatan proses data yang nantinya akan dipublikasikan mengenai informasi kepada masyarakat. Untuk kesiapan PPID terhadap OPD dalam mengumpulkan data atau informasi masih belum dilakukan sepenuhnya. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lamandau telah melaksanakan program kerja sesuai dengan undang-undang dan menggunakan media website sebagai sarana publikasi ke masyarakat. Komisi Informasi Pusat setiap tahun yang menilai kinerja badan publik di provinsi. Yang dinilai adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Hasilnya bahwa Kabupaten Lamandau merupakan Kabupaten yang dari belum aktif melakukan layanan informasi publik pada tahun sebelumnya dan mendapatkan kemajuan masuk kualifikasi cukup informatif.

PPID di Kabupaten Lamandau dibangun secara sistem dengan penggunaan aplikasi yang dimiliki kemandagri yang mewajibkan kantor atau badan dinas di Kabupaten Lamandau untuk menyampaikan informasi-informasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pengelola informasi publik. Namun, tidak semua OPD memahami tugas dan fungsi di dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Keterbatasan PPID utama di Kabupaten Lamandau dalam menyediakan informasi yang lebih spesifik terkait informasi dinas lainnya membuat PPID mengalami kendala dalam pelayanan dan penyediaan informasi. Peran PPID dan OPD dalam pelayanan publik dirasa masih belum optimal, hal ini tidak lain dikarenakan dimulai dari peran PPID dalam hal PPID Utama atau Kabupaten yang walaupun kepengurusan secara tertulis sudah ada namun tidak ada komitmen yang kuat dari tingkat pejabat selaku pengambil kebijakan yang seharusnya peduli dan respon pada UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Peran PPID masih belum maksimal terutama dikalangan masyarakat dalam penyediaan informasi publik. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai PPID baik dari peran, fungsi dari PPID tersebut. Dari dinas terkait untuk sosialisasi tentang PPID sangat kurang. Namun, sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif dengan adanya PPID di Kabupaten Lamandau dalam hal menyediakan website untuk penyediaan informasi kepada publik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Lamandau

Pelayanan Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008). Bahwa jika dilihat dari faktor konsistensi pejabat dalam pengisian data informasi publik pada website

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat.

Memberikan Pelayanan publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pengisian data atau dokumentasi informasi publik baik berkala, serta merta maupun setiap saat pada website PPID Kabupaten Lamandau oleh PPID Pembantu masih belum konsisten, ada beberapa hal yang menjadi faktor tidak konsisten. Adanya keterbatasan SDM untuk pengelolaan pelayanan informasi publik yang ada di Kabupaten Lamandau, masih terdapat banyak PPID Pembantu belum memahami tupoksi sebagai PPID Pembantu. Terbatasnya anggaran untuk pengelolaan Layanan Informasi Publik sehingga berpengaruh terhadap Layanan informasi publik, pegawai tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik.

Sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Dalam hal adanya permohonan informasi publik, PPID bertugas mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik. Namun, Peran Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi khususnya Organisasi Perangkat Daerah, dengan adanya PPID di setiap badan publik nampak belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Seperti pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Bahwa dalam penyampaian informasi PPID pembantu dan sekretariat di setiap OPD memberikan hasil yang kurang baik, menganggap bahwa data informasi hanya milik badan perorangan. Yang sebenarnya untuk keterbukaan informasi publik bahwa data tersebut dapat dipublikasikan agar digunakan untuk kepentingan secara umum, terutama untuk pengambilan kebijakan pimpinan.

Sedangkan menurut faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan bersifat material, Menurut Moenir (2002:88) dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu:

a. Kesadaran pegawai

Dalam penelitian ini bahwa Peran Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik hasilnya kurang baik, bahwa kurangnya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Adanya aturan

Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau jika dilihat dari aturan bahwa dalam menjalankan peran memberikan hasil yang kurang baik, sedangkan PPID Kabupaten Lamandau berpedoman pada UU KIP, Perki 1/2010, untuk pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya dalam menggunakan media website sebagai sarana publikasi kepada masyarakat. Serta Kabupaten Lamandau menjalankan PPID sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Komisi Informasi Pusat setiap tahun yang menilai kinerja badan publik di Provinsi.

c. Faktor organisasi

Kabupaten Lamandau masih belum adanya sistem yang membangun data tersebut. Saat ini aplikasi yang ada di kemendagri menjadi cerminan baik dalam penyampaian informasi masih tergolong susah. Pihak PPID terus mendorong OPD di setiap badan publik untuk dapat mendirikan loket pelayanan yang digunakan dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Dalam upayanya untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada publik dari berbagai dinas yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau, maka pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau melakukan sosialisasi dan memberikan dorongan kepada PPID Pembantu/ OPD untuk yang belum menyiapkan PPID nya agar secepatnya membentuk dan dapat tanggap untuk terus mensuplai berbagai informasi terbaru ke PPID utama Kabupaten Lamandau. Dengan melakukan sosialisasi PPID Utama kepada PPID Pembantu meskipun belum berjalan 100 %, PPID tetap berusaha agar semua OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk menggunakan website yang telah disediakan. Beberapa OPD sudah melaksanakan tetapi tidak semua OPD melaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

d. Faktor kemampuan dan keterampilan

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan. Dari penelitian ini bahwa faktor kemampuan dan keterampilan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau telah menggunakan teknologi dalam penyediaan informasi dengan adanya website yang dapat

diakses melalui <https://portal.lamandaukab.go.id> dan email ppid@lamandaukab.go.id terkait dengan penyediaan informasi pemerintah yang diselenggarakan oleh PPID tersebut.

PPID mempunyai peranan penting di dalam masyarakat terutama untuk mengakses informasi publik. Agar masyarakat tidak menjadi masyarakat yang gagap akan informasi publik. Sedangkan untuk SDM di Kabupaten Lamandau adanya keterbatasan SDM untuk pengelolaan pelayanan informasi publik yang ada di Kabupaten Lamandau, masih terdapat banyak PPID Pembantu belum memahami tupoksi sebagai PPID Pembantu, sehingga pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik menunjukkan hasil yang kurang baik. Masalah kemampuan dalam bidang IT, Faktor tersebut cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi, masalah tenaga khusus SDM yang menyangkut ketenagaan ini adalah masalah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan utamanya dalam penguasaan bidang Teknologi khususnya di Kabupaten Lamandau.

e. Faktor sarana pelayanan

Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan. Dalam penelitian ini keinginan Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menerapkan sistem layanan berbasis Internet (online) merupakan sebuah terobosan yang berorientasi pada kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun untuk bisa mendukung semua itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk sarana prasarana umumnya di Kabupaten Lamandau, dalam hal jaringan internet sudah tersedia. Namun, masih banyak kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki akses jaringan internet sehingga untuk mengakses informasi harus mendatangi tempat-tempat yang terdapat jaringan internet.

Sehingga masih banyak OPD memiliki keterbatasan di dalam menggunakan internet, hal inilah yang membuat hasil peran PPID dan OPD menjadi kurang baik. Apalagi pemahaman di tingkat bawah seperti admin OPD di daerah terpencil masih terbatas. Karena kesadaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang belum dipahami. Untuk meningkatkan hal tersebut tentunya penyediaan anggaran dan sarana kerja, tentu memang menjadi perhatian agar semua sistem yang dibangun bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan karena pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan menyangkut anggaran operasional bahwa masih terbatasnya anggaran untuk pengelolaan Layanan Informasi Publik sehingga berpengaruh terhadap Layanan informasi publik, pegawai tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik misalnya monitoring dan evaluasi ke lapangan, rapat kerja, rapat koordinasi, dan kegiatan sosialisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi menunjukkan hasil kurang baik. Dikarenakan kesiapan PPID terhadap OPD dalam mengumpulkan data atau informasi masih belum dilakukan sepenuhnya. Kendala berikutnya adalah masih ada lembaga/dinas atau OPD selaku PPID Pembantu yang belum menyediakan informasi dengan tanggap dan sesuai dengan prinsip PPID. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau terus melakukan sosialisasi. Walaupun ada beberapa OPD sudah melaksanakan penyampaian informasi tetapi tidak semua OPD melaksanakan sebagaimana yang diharapkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konsistensi Peran Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengisian data informasi publik pada website yang telah disediakan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pengisian data atau dokumentasi informasi publik baik berkala, serta merta maupun setiap saat pada website PPID Kabupaten Lamandau oleh PPID Pembantu memberikan hasil yang kurang baik, bahwa banyak PPID Pembantu belum memahami tupoksi baik dari segi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian maupun pelayanan informasi. Kurangnya kepedulian dan komitmen Pimpinan badan publik dalam hal ini Sekretaris SOPD selaku ketua PPID Pembantu akan pentingnya Layanan Informasi Publik. Adanya keterbatasan SDM untuk pengelolaan pelayanan informasi belum optimal, sehingga hasilnya peran PPID kurang baik. Terbuktinya belum tersedianya tenaga atau SDM yang khusus menangani bidang Informasi. Terbatasnya anggaran untuk pengelolaan Layanan Informasi Publik sehingga berpengaruh terhadap layanan informasi publik. Masih banyak kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki akses jaringan internet sehingga banyak OPD memiliki keterbatasan di dalam

menggunakan internet, hal tersebut dapat mempengaruhi proses dalam penggunaan aplikasi PPID. Pemahaman di tingkat bawah seperti admin-admin OPD di daerah terpencil masih terbatas. Karena kesadaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang masih belum dipahami.

SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu untuk terus diberikan sosialisasi kepada semua pihak menyangkut berlakunya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melakukan sosialisasi mengenai peran, tugas, dan fungsi PPID sehingga dapat memahami bahwa Peran PPID penting bagi penyediaan dan pelayanan informasi baik itu dari Badan Publik maupun Masyarakat.
2. Dilakukannya peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan utama bagi para SOPD terkait dan petugas PPID dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih fokus. Serta pelatihan-pelatihan dalam penggunaan aplikasi. Sehingga untuk itu perlu dipikirkan untuk ke depan merekrut tenaga-tenaga SDM sebanyak 2 orang untuk setiap SOPD terkait yang memang mempunyai kualifikasi khusus di bidang IT untuk menangani penyediaan dan pelayanan informasi publik tersebut.
3. Kebutuhan akan fasilitas pendukung yang berkaitan dengan alat-alat untuk menjalankan sistem dengan menggunakan Teknologi Informasi, misalnya pengadaan tambahan sarana Teknologi Informasi, komputer/ laptop, printer, scanner, modem, wifi untuk PPID Pembantu maupun SOPD. Karena pada akhirnya tujuan dari semua itu adalah untuk pelayanan kepada masyarakat agar hak-hak nya untuk mendapatkan Informasi bisa dipenuhi oleh setiap Badan Publik.
4. Perlunya kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah terpencil Kabupaten Lamandau untuk menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yaitu Tower BTS yang bisa menjangkau masyarakat dalam penggunaan internet. Sehingga dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas di setiap OPD di daerah dalam proses pengiriman laporan kepada PPID.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrizal, D., & Sahuri, C. (2012). Analisis Manajemen Pelayanan Publik.

Jurnal Administrasi Pembangunan, 1(01).

- [2] Andril. (n.d.). Retrieved Mei 12, 2021, from https://www.academia.edu/16494745/Modul_Pelatihan_PPIDdiakses5_maret2021
- [3] Arsyika, Z. (2016). Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Oleh Pejabat

- Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom FISIP*, 3(02).
- [4] Azis, R. Y. (2018). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [5] Hamdi, M., & Ismaryati, S. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi. In: *Filosofi Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [6] Herawan, M., & Pramudyo, G. N. (2020). The Role of Information and Documentation Management Officer in Public Information Disclosure Implementation at Local Government. In *2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)*. Atlantis Press. ISO 690, 239-242.
- [7] Hutahayan, J. F. (2019). Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: Deepublish.
- [8] Isbandono, P., Lestari, Y., Pangestu, M., & Utami, D. (2019). Implementation of Public Information Services (Case Study at Youth and Sport Department of East Java Province). In *International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*. Atlantis Press, 467-471.
- [9] Lukito, C. (2017). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik. Vol. 1 No. 1 (2017). *JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- [10] MC KOTA PALANGKARAYA. (2019, Maret 19). Diskominfoantik Gelar Bimtek PPID Se Kalteng. Retrieved Mei 12, 2021, from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/334097/diskominfoantik-gelar-bimtek-%20ppid-se-kalteng>
- [11] Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [12] Moenir. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [13] Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [14] Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [15] PP No. 61 Tahun 2010. (2008). PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [16] Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta : Grafindo.
- [17] Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [18] Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [19] Sugiharto, U. (2018). Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikasi)*, 4(1).
- [20] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta.
- [21] Surat Keputusan Menteri . (2003). *Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- [22] Surip, M., Gafari, M. O., & Pulungan, H. K. (2020). The Role of PPID in Implementing Policy, Service, Publication of Public Information in State University of Medan. . *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 3(1), 387-394.
- [23] Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [24] Trijyanto, D., & Idrus, I. A. (2019). Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *IKRA-ITH HUMANIORA. Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 107-117.
- [25] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. (n.d.). *Tentang Pelayanan Publik*.
- [26] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (n.d.). *Keterbukaan Informasi Publik*.
- [27] Wibowo, M. F. (2019). Peran Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik. *VOXPOF*, 1(1), 88-97.
- [28] Widianatalia. (2018, Juni 26). Hasil Evaluasi Kinerja PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Kabupaten/Kota Se “ Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2018. Retrieved Mei 12, 2021, from <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/2137/hasil-evaluasi-kinerja-ppid-pembantu-%20lingkup-pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah-dan-ppid-kabupaten-kota-%20se-ndash-kalimantan-tengah-semester-i-tahun-2018>